



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 27 S.D 29 NOVEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI fokus pada pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di tengah pandemi Covid-19, mulai dari relaksasi penggunaan dana BOS, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh, kebijakan kuota internet, hingga persiapan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Nasional 2021. Pada Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020, Komisi X DPR RI memutuskan akan melakukan kunjungan pengawasan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten serta Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
4. Perppu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020.

B. TUJUAN

Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Lebak Provinsi Banten yaitu untuk mengetahui gambaran umum dan data capaian atas pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait relaksasi penggunaan dana BOS akibat pandemi *Covid-19*, Pendidikan

Jarak Jauh, Program Bantuan Kuota Internet, dan persiapan Asesmen Nasional 2021.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

NO.	NAMA	FRAKSI/DAPIL
1.	Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin	PGERINDRA/ Sumatera Utara III
2.	My Esti Wijayati	PDIP/ D.I.Yogyakarta
3.	Putra Nababan	PDIP/ DKI Jakarta I
4.	Vanda Sarundajang	PDIP/ Sulawesi Utara
5.	Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H.	PG/ Jawa Tengah I
6.	Adrian Jopie Paruntu	PG/ Sulawesi Utara
7.	Dra. Adriana Dondokambey, M.Si.	PDIP/ Sulawesi Utara
8.	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.	PGERINDRA/ DKI Jakarta II
9.	Ir. Dwita Ria Gunadi	PGERINDRA/ Lampung II
10.	Eva Stevanny Rataba	PNASDEM/ Sulawesi Selatan III
11.	Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M.	PNASDEM/ Sulawesi Tenggara
12.	Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si	PKB/ Sulawesi Selatan II
13.	Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.	PKB/ Lampung I
14.	Drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.	PAN/ Bengkulu

Kunjungan kerja didampingi oleh Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI.

Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan DPR RI yaitu:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Dadang Prayitna, S.IP, M.H. | Kepala Bagian Set. Komisi X DPR RI |
| 2. Dwi Lestari | Staf Sekretariat Komisi X DPR RI |
| 3. Agom Herlani | Staf Sekretariat Komisi X DPR RI |
| 4. Anna Kurniawati | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 5. Masad Masrur | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 6. Suciati | Bagian Media Cetak dan Media Sosial |

D. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dengan H. Ade Sumardi, S.E., Wakil Bupati Lebak Provinsi Banten, yang didampingi oleh:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Drs. H. Wawan Ruswandi.
2. Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Adin Wahyudin.
3. Organisasi Profesi Pendidikan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
4. Perwakilan LPMP Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
5. Perwakilan Komite Sekolah dari beberapa satuan pendidikan.
6. Perwakilan Wali Murid SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lebak.

II. DATA TEMUAN

A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Bidang Pendidikan antara lain, menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas antara lain melalui:
 - a. Satuan Pendidikan mengangkat Tenaga Honorer yang diberikan Insentif (Gaji) dari dana BOS dan anggaran APBD.
 - b. Usulan pengangkatan CPNS guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Data Pendidik Kabupaten Lebak:

No	Jenjang	Kebutuhan Guru	Keadaan Guru	Kekurangan Guru
1	SD	6.860	3.610	3.610
2	SMP	2.846	2.846	1.398

2. Mengembangkan akses belajar di daerah dengan menyediakan alat peraga pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi sarana prasarana lain sekolah (UKS, toilet, ruang guru, ruang perpustakaan dan ruang laboratorium), penambahan ruang kelas dan pengembangan sekolah satu atap.
3. Peran APBD dalam mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam tiga tahun terakhir dan kedepan:
 - a. Penyediaan Sarana TIK untuk Sekolah.
 - b. Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penguasaan IT.
 - c. Bekerjasama dengan penyedia layanan platform pembelajaran.
4. Selama Pandemi *Covid-19*, pelaksanaan relaksasi penggunaan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan akibat pandemi:
 - a. Memberikan kebebasan kepada Satuan Pendidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pembelajaran (pulsar, penyediaan media pembelajaran jarak jauh) dan sarana prasarana pada masa *Covid-19*.
 - b. Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memberikan insentif bagi guru honorer (tidak dibatasi persen) .
5. Pelaksanaan Program Bantuan Kuota Internet dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh demi mendukung pelaksanaan proses pendidikan akibat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Lebak Banten:

- a. Nomor HP siswa dan Guru didaftarkan ke Dapodik, kemudian sekolah mencetak surat pertanggungjawaban, divalidasi oleh Kemdikbud melalui Dapodik, jika valid, maka kuota internet akan dikirim kepada siswa.
 - b. Bila siswa tidak memiliki kartu, beberapa provider menawarkan pemberian kartu perdana secara gratis.
6. Persiapan dan kesiapan pemerintah Kabupaten Lebak dalam menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar:
- a. Melakukan sosialisasi kepada pengawas, kepala sekolah dan proktor dalam pelaksanaan AKM.
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan AKM untuk proktor.
 - c. Memetakan kesiapan sekolah dalam menghadapi AKM, seperti sekolah yang menumpang, diarahkan ke sekolah yang memiliki sarana dan prasarana .

B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN

1. Kendala yang ditemui Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengembangkan akses Pembelajaran Jarak Jauh antara lain:
 - a. Kesiapan siswa dalam kegiatan BDR (Belajar Dari Rumah) secara mandiri masih rendah.
 - b. Kompetensi siswa dalam penguasaan TIK masih belum maksimal.
 - c. Dukungan orang tua dalam pemenuhan pembelajaran dan pendampingan masih rendah.
 - d. Kesiapan infrastruktur, meliputi perangkat maupun jaringan internet masih kurang.
 - e. Kondisi Ketersediaan Jaringan Internet dan Komputer.

Jenjang	Jumlah Sekolah	Terkoneksi Internet	Blank Spot	Ketersediaan Komputer <12 (SD) <177 (SMP)	Ketersediaan Komputer >12 (SD) >17 (SMP)
SD	773	656	117	720	53
SMP	215	166	49	126	89

2. Kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana BOS: keterbatasan anggaran di Sekolah, karena sumber anggaran hanya dari anggaran BOS.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh antara lain:
 - a. Siswa tidak memiliki HP Android untuk sarana belajar daring dan tidak tersedia sinyal yang baik/*blankspot*.
 - b. Nomor HP siswa dan guru ketika divalidasi oleh Kemendikbud tidak aktif.
 - c. Adanya No HP yang didaftar bukan milik siswa atau orang tua.
4. Kendala yang dihadapi dan persiapan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar: masih terdapat Sekolah yang berada pada lokasi *blank spot* (SD ada 117 Sekolah, SMP ada 49

Sekolah), dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perangkat AKM (SD sebanyak 720 Sekolah, SMP sebanyak 126 Sekolah).

C. MASUKAN DAN PANDANGAN

1. Wakil Bupati Lebak, **H. Ade Sumardi, S.E.** menyampaikan beberapa pandangan terkait Pendidikan di Kabupaten Lebak, antara lain sebagai berikut:
 - a) Kabupaten Lebak dengan luas Wilayah 304.472 Ha, terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk sekitar 1,2 Jiwa dengan mayoritas pencahariannya adalah petani. Namun, dengan lahan yang rata-rata hanya sekitar 0,25 Ha yang dimiliki petani, menunjukkan bahwa luas lahan tersebut tidak ideal. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani, dan berdampak pula pada tingkat pendidikan anak-anak petani.
 - b) Proses pendidikan sangat terdampak Pandemi Covid-19. Proses pendidikan telah diupayakan dilakukan melalui daring, luring dan guru keliling. Masalah terbesar adalah pengadaan internet dan komputer yang memadai untuk mendukung pendidikan daring.
 - c) Permasalahan terbesar lainnya adalah kondisi jumlah guru yang terbatas dan menjelang pensiun dan masih mengandalkan guru honorer (sebagaimana data tertulis).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, **Drs. H. Wawan Ruswandi** secara daring menyampaikan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Kendala ketersediaan komputer untuk SD tidak terpenuhi. Sementara komputer untuk SMP sudah sekitar 90% terpenuhi. Meskipun kendala terbesar adalah penyediaan internet.
 - b) Sebagaimana data yang disampaikan (tertulis), jumlah guru belum memenuhi. Telah diinsentifkan anggaran sebesar Rp25 Milyar untuk mendukung kinerja para guru.
 - c) Terdapat 160 SMP tanpa Kepala Sekolah atau dijabat oleh pelaksana tugas, dikarenakan aturan wajib bagi Kepala Sekolah untuk mengikuti Diklat Kepala Sekolah yang berbiaya mahal. Sementara terdapat 8 Sekolah Dasar yang tidak memiliki kepala sekolah atau dijabat oleh pelaksana tugas, dikarenakan permasalahan minimnya kepala sekolah yang mengikuti Diklat Kepala Sekolah.
 - d) Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Kabupaten Lebak, sebagian besar digunakan untuk insentif guru di daerah terpencil. Namun DAK tersebut didistribusikan oleh Kemendes sesuai dengan Indeks Desa Tertinggal yang tidak selalu sesuai dengan kondisi. Ada beberapa sekolah tertinggal tidak masuk dalam Indeks Desa Tertinggal yang mengakibatkan tidak terkovernya sekolah tersebut.
 - e) Pada awal tahun 2020 terdapat banjir yang menghanyutkan sekolah (yakni SDN 2 Banjaririgasi, SDN 1 Banjaririgasi, SDN 1 Sukarame, dan SMPN 4 Lebak Gedong) yang sampai saat ini belum terganti dengan infrastuktur yang baru. Meskipun proses belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh, namun kondisi tersebut harus segera diatasi.
3. Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Banten, **Adin Wahyudin** menyampaikan pendapat antara lain:

- a) Sebelum Pandemi Covid-19, kondisi Pendidikan di Kabupaten Lebak memang masih tertinggal. Kondisi Pandemi memperparah pendidikan di Kabupaten Lebak. Pendidikan di Kabupaten Lebak masih tertinggal dengan Kab/Kota lainnya di Banten, seperti Serang, Cilegon dan Tangerang.
 - b) Kunci Pendidikan adalah SDM dan infrastruktur. SDM yang diperlukan adalah guru. Melihat kondisi guru yang memprihatinkan, maka Kabupaten Lebak harus dibantu untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas guru. Jika proses pendidikan tatap muka dimulai 2021, kondisi guru harus lebih dahulu diperbaiki, kurikulum harus kembali disesuaikan, dan dana BOS harus mampu memenuhi kebutuhan sekolah dan tidak perlu ditahan.
 - c) Dengan dihapusnya UN, mutu pendidikan makin merosot. Kita harus bertanggungjawab terhadap akan adanya generasi yang hilang akibat pengelolaan pendidikan kita yang kurang serius dan kurang baik.
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI, **Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si.** menyampaikan masukan antara lain:
- a) Bantuan kuota internet untuk mendukung PJJ di Kabupaten Lebak lebih dari 233 ribuan kuota internet. Ada sekitar 228 ribu yang termanfaatkan dengan baik, namun ada sekitar 5 ribuan yang tidak aktif, tidak terdeteksi atau dalam masalah validasi, sehingga perlu dilacak. Pada 28 November 2020 ini akan dilakukan isi kuota bagi yang aktif dengan tetap mencari 5 ribuan data yang tidak aktif tersebut sehingga bisa digunakan.
 - b) Validasi data pendidikan tetap menggunakan Dapodik, oleh karena itu para operator sekolah harus selalu meng-*update* data Dapodik Sekolahnya agar memperoleh manfaat pada setiap kebijakan Pemerintah.
 - c) Sejak mengembangkan kebijakan otonomi sekolah, perangkat komputer dapat dipenuhi melalui dana BOS, meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran.
 - d) Terkait kekurangan guru, sekolah melalui LPMP dapat mengusulkan penambahan guru, baik P3K maupun PNS. Proses tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan.
5. Pandangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang disampaikan antara lain oleh **Putra Nababan** dan **Andi Muawiyah Ramly** sebagai berikut:
- a) Pemerintah akan mengangkat sekitar 1 Juta guru honorer menjadi P3K, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu proaktif agar jumlah guru dapat terpenuhi melalui program Pemerintah ini. Diharapkan masalah teknis administrasi yang dilakukan secara *online*, tidak menghambat pemenuhan jumlah guru tersebut.
 - b) Komisi X DPR RI tidak lagi membahas infrastruktur pendidikan karena terkait infrastruktur tersebut dibahas oleh Komisi V DPR RI dengan KemenPUPR RI. Namun Kemendikbud RI dan Komisi X DPR RI tetap dapat mengusulkan dan dapat mengawasi jalannya perbaikan infrastruktur tersebut.

- c) Untuk daerah yang masih tertinggal, memang perlu afirmasi, atau kebijakan khusus, agar ada Akselerasi Pendidikan. Hal ini juga tergantung pada pimpinan daerahnya.

III. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, baik sebelum maupun selama Pandemi Covid-19 terkendala oleh, antara lain:
 - a) Kekurangan guru pengajar, baik di tingkat SD sekitar 3.610 guru, dan di tingkat SMP sekitar 1.398 guru. Jumlah guru pengajar akan makin berkurang seiring dengan banyaknya guru yang akan memasuki masa pensiun.
 - b) Terdapat 8 Sekolah Dasar (SD) dan 160 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki Kepala Sekolah definitif, dikarenakan minimnya guru/calon kepala sekolah yang mengikuti Diklat Kepala Sekolah, diantaranya karena biaya Diklat yang mahal.
 - c) Pada awal tahun 2020 terdapat banjir yang menghanyutkan sekolah (yakni SDN 2 Banjaririgasi, SDN 1 Banjaririgasi, SDN 1 Sukarame, dan SMPN 4 Lebak Gedong) yang sampai saat ini belum terganti dengan infrastuktur yang baru.
 - d) Kendala pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Belajar Dari Rumah (BDR) antara lain: (1) sarana dan prasarana IT sekolah maupun siswa kurang memadai; (2) fasilitas internet yang terbatas (*blank spot* di berbagai area); (3) lemah dalam penguasaan teknologi komunikasi oleh pendidik maupun peserta didik; (4) terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan kuota internet; (5) dukungan orang tua dalam pendampingan belajar siswa masih rendah.
 - e) Dana BOS tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa sekolah di daerah tertinggal justru tidak mendapatkan bantuan karena data yang digunakan adalah data Indeks Desa Tertinggal (dari Kemendes) yang tidak sepenuhnya mengkaver sekolah tertinggal.
 - f) Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar, terdapat kendala seperti adanya sekolah yang berada pada lokasi *blank spot* (SD ada 117 Sekolah, SMP ada 49 Sekolah), dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perangkat AKM (SD sebanyak 720 Sekolah, SMP sebanyak 126 Sekolah).
2. Terkait beberapa kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak Banten mengusulkan beberapa hal, antara lain: penambahan jumlah guru SD maupun SMP serta pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K atau PNS; peningkatan fasilitas IT untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh; penambahan anggaran bagi peningkatan sarana, prasarana dan dukungan bagi pelaksanaan pendidikan; dan dukungan bagi pembangunan kembali sekolah yang hanyut akibat banjir awal 2020.

IV. REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten perlu lebih pro-aktif dalam menyampaikan usulan terkait penambahan jumlah guru SD maupun SMP,

peningkatan fasilitas IT maupun peningkatan sarpras pendidikan kepada Pemerintah.

2. Kemendikbud RI perlu lebih afirmatif terhadap kendala dan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, utamanya pemenuhan jumlah guru dan peningkatan fasilitas IT maupun sarpras pendidikan.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, perlu lebih memperkuat dan memperbaiki peningkatan kualitas pendidikan dasarnya, mengingat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak lebih tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 30 November 2020

Ketua Tim,

PUTRA NABABAN
A-157